

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah desa adat di Bali. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, tujuan pendirian LPD yaitu memastikan masyarakat hukum adat yang merupakan *krama desa pakraman* (masyarakat hukum adat yang ada di Bali) memperoleh kesejahteraannya. Sebagai lembaga keuangan milik *desa adat* LPD harus ditingkatkan tata kelolanya karena bermanfaat secara ekonomi maupun sosial budaya terhadap *krama desa adat* (Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017). Untuk menjamin tata kelola LPD yang baik diperlukan suatu badan pengawas yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi seluruh aktivitas LPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 ayat (11), yang bertugas mengawasi pengelolaan LPD adalah badan pengawas internal (*panureksa*). Sementara itu tugas dari badan pengawas menurut Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 pasal 45 yaitu melaksanakan pemantauan serta pemeriksaan terhadap tata kelola LPD, melaksanakan audit, menyampaikan pedoman serta kaidah-kaidah kebijakan untuk *prajuru* (pengurus yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di *desa adat*), memberikan petunjuk mengenai prosedur kepada *prajuru*, menyampaikan estimasi serta arahan yang berkaitan dengan pengukuhan kelembagaan, kegiatan, manajemen serta operasional LPD, mengamati tindakan *prajuru* dalam penyelesaian masalah, mempromosikan LPD, memberikan catatan terhadap *prajuru* terhadap kesalahan yang terjadi. Badan pengawas LPD juga memiliki fungsi sebagai auditor internal

LPD yang bertugas untuk mengawasi jalannya kebijakan dan pengelolaan usaha LPD (Hermawan dan Sudiartana, 2015). Jadi peran dari badan pengawas LPD sangat strategis, di samping menjadi auditor internal, badan pengawas juga berperan sebagai partner kerja yang efektif untuk kemajuan LPD (Wedayani dan Jati, 2012). Maka dari itu kinerja dari badan pengawas LPD harus diperhatikan, karena akan dapat mempengaruhi kinerja LPD.

Kinerja badan pengawas LPD sangat penting karena badan pengawas melaksanakan pemantauan atau pemeriksaan untuk mengetahui terjadinya kecurangan serta kesalahan yang membuat LPD rugi (Sudiartini, 2017). Menurut Bunga (2012) kinerja badan pengawas yaitu tingkatan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan tanggung jawab dan posisinya dalam rentangan waktu tertentu, serta dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan semua hasil kerjanya sudah baik atau sebaliknya. Sementara itu menurut Putra dan Jati (2019) kinerja pengawas adalah mutu penyelesaian pengawasan yang telah dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Kinerja diukur dengan standar, dimana kualitas berhubungan dengan tingkatan hasil kerja, sedangkan kuantitas yaitu total seluruh pekerjaan yang sudah diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, sementara ketepatan waktu merupakan kesamaan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang sudah ditetapkan (Prawitasari dan Bandera, 2015). Indikator kinerja badan pengawas sebagai auditor internal yaitu pencapaian tujuan audit serta kredibilitas badan pengawas, karena terjadi peningkatan kualitas pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaannya (Putra dan Wisadha, 2013). Penting untuk menjaga kinerja badan pengawas LPD karena akan berdampak terhadap kinerja LPD.

Badan pengawas LPD menjadi pilar yang penting dalam mengawasi operasional LPD, kini telah berhasil mengarahkan LPD ke kinerja yang sangat baik. Hal ini dilihat dari perkembangan LPD di Bali sendiri sangat baik, mengutip data Lembaga Pemberdayaan LPD (LP LPD), total dari 1.270 LPD di Bali, 49,47% atau 514 LPD memiliki asset lebih dari Rp. 5 Miliar, jumlah ini meningkat 5% dibandingkan dengan tahun 2016. (dalam Bisnis.com, diakses pada tanggal 28 Januari 2020). Sementara itu dari kinerja keuangan LPD seluruh Bali yang diukur dengan menggunakan kaidah CAMEL, terdapat 70,3% LPD dengan kategori sehat, 9,1% cukup sehat, 5,4% kurang sehat dan 15,1% tidak sehat. (dalam Tribun-Bali.com, diakses pada 29 Januari 2020).

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan LPD yang sangat baik. Berikut data Dinas Bagian Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 dan laporan triwulan pertama tahun 2019 ;

Tabel 1.1  
Jumlah LPD Sehat dan Total Asset  
LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dan Triwulan 1 2019

Jumlah LPD	Jumlah LPD yang Sehat		Total Asset LPD	
169 LPD	Tahun 2018	Triwulan I 2019	Tahun 2018 (000)	Triwulan I 2019 (000)
	99 LPD	106 LPD	Rp. 2.110.404.551	Rp. 2.569.735.825

(Sumber : Dinas Bagian Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Buleleng)

Dari data tersebut terjadi peningkatan jumlah LPD dengan kategori sehat dan total asset LPD. Pada tahun 2018 jumlah LPD di kabupaten Buleleng mencapai 169 LPD dengan total asset sebesar Rp. 2.110.404.551.000 dan 99 LPD dengan kategori sehat. Sementara pada triwulan pertama tahun 2019 jumlah LPD dengan

kategori sehat meningkat menjadi 106 LPD dengan total asset Rp. 2.569.735.825.000. Perkembangan LPD yang baik ini tidak terlepas dari peranan badan pengawas yang bertugas mengawasi tata kelola LPD.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkatan kinerja badan pengawas LPD, akan tetapi menjadi auditor internal yang profesional badan pengawas wajib bersikap independensi untuk menjalankan tugasnya. Menurut Kumaat (2010) independensi adalah kunci yang paling penting untuk menilai peranan auditor internal. Independensi merupakan perilaku yang bebas dari tekanan atau terbebas dari kontrol pihak tertentu (Fadhil, 2016). Independensi dalam hal ini mencakup pelaporan yang sesuai dengan fakta serta terbebas dari pengaruh pihak lain dalam memberikan pertimbangan (Putra dan Jati, 2019). Hasil penelitian Cintyaningsih (2015) menyatakan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Namun hasil penelitian Widyantara, dkk. (2017) memperlihatkan hasil jika independensi berpengaruh positif terhadap kinerja badan pengawas sebagai auditor internal.

Selain independensi, pengalaman menjalankan tugas sebagai pengawas juga dapat mempengaruhi kinerja pengawas itu sendiri. Pengalaman kerja yang dimiliki pengawas akan sangat membantu ketanggapan serta keterampilan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya (Putra dan Jati, 2019). Menurut Mazrial (2010) seseorang yang telah berpengalaman sebagai pengawas atau auditor internal akan lebih mudah melakukan pengawasan karena telah mengetahui pos-pos yang sering untuk disalahgunakan. Jadi pengalaman kerja menjadi hal yang penting untuk menilai serta memperkirakan tingkat kinerja badan pengawas (Putra dan Jati, 2019). Hasil penelitian yang ditulis oleh Putra

dan Jati (2019) menunjukkan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kinerja badan pengawas sebagai auditor internal LPD. Sementara itu hasil penelitian Cintyaningsih (2015) memperlihatkan jika pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Selain dua faktor tadi, time budget pressure juga dapat mempengaruhi kinerja badan pengawas. Time budget pressure membuat pengawas menyelesaikan semua tahapan pengawasan atau audit secara efektif dan efisien agar semua tahapan dapat terselesaikan tepat waktu, sehingga akan berdampak pada penghematan biaya yang dikeluarkan, dengan kata lain semakin efektif dan efisien pengawas menyelesaikan tugasnya maka akan semakin baik kinerja pengawas tersebut (Rahmadhany, 2019). Akan tetapi pada kenyataannya time budget pressure membuat tekanan yang bisa mempengaruhi kinerja pengawas atau auditor internal secara keseluruhan. Hal dikarenakan adanya tekanan waktu yang membuat auditor harus cepat menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga berdampak pada tingkat ketaatan auditor yang rendah dalam mengimplementasikan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga dapat mempengaruhi kinerjanya (Purwanti, 2017). Hasil penelitian Purwanti (2017) menyatakan time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal. Sementara itu hasil penelitian Rahmadhanty (2019) menyatakan time budget pressure berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Suatu organisasi tentu setiap individu dalam badan pengawas LPD memiliki komitmen terhadap organisasinya. Komitmen dapat diartikan sebagai sikap yang ingin tetap bertahan dalam organisasi dan akan berpartisipasi dalam setiap cara organisasi dalam mencapai tujuannya (Khairat, 2017). Menurut Fadhil

(2016) komitmen organisasi dapat mencerminkan tingkat seseorang dapat memahami sebuah organisasi dan terikat pada setiap tujuan organisasinya. Komitmen organisasi dapat memunculkan rasa memiliki yang erat terhadap organisasinya, bila individu memiliki keterikatan terhadap norma-norma dalam organisasinya maka individu tersebut akan selalu bekerja sepenuh hati dan memberikan kemampuan terbaiknya untuk organisasi sehingga kinerja dari organisasinya meningkat (Alfiyanto dan Suryandari,2015). Hasil penelitian yang ditulis Fadhil (2016) menyatakan jika komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal. Namun hasil penelitian Putra dan Aryanto (2016) memperlihatkan jika komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal PT SINARMAS MSIG *Insurance* Provinsi Bali.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widyantara, dkk. (2017) dan Putra dan Jati (2019). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widyantara, dkk (2017) dan Putra dan Jati (2019) yaitu terletak pada penggunaan variabel independensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja badan pengawas LPD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penambahan variabel time budget pressure dan komitmen organisasi, pemilihan variabel tersebut karena keduanya masih belum digunakan untuk mengukur kinerja badan pengawas LPD. Kedua, perbedaan populasi penelitian. Populasi penelitian Widyantara, dkk. (2017) yaitu LPD Se-Kecamatan Buleleng, populasi penelitian Putra dan Jati (2019) yaitu LPD Se-Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sementara dalam penelitian ini yang menjadi populasinya yaitu LPD yang dikategorikan sehat Se-Kabupaten Buleleng. Dari banyak literatur ilmiah keempat variabel ini masih sangat relevan untuk diuji kembali dengan

pertimbangan bahwa hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang inkonsisten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti faktor yang dapat mempengaruhi kinerja badan pengawas LPD yang berjudul **“DETERMINAN KINERJA BADAN PENGAWAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN BULELENG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Perkembangan LPD di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari peran badan pengawas sebagai auditor internal dan pengawas tata kelola LPD. Peningkatan jumlah LPD dengan kategori sehat dan jumlah asset, tidak terlepas dari kinerja badan pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap LPD. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja badan pengawas LPD, akan tetapi sebagai auditor internal tingkat independensi, pengalaman kerja, time budget pressure dan komitmen organisasi menjadi beberapa hal yang sangat penting dapat mempengaruhi kinerja mereka.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah ini sangat diperlukan agar lebih fokus pada beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan terarah pada variabel yang digunakan. Fokus penelitian yaitu memahami pengaruh independensi, pengalaman kerja, time budget pressure dan komitmen organisasi terhadap kinerja badan pengawas LPD sebagai auditor internal LPD di Kabupaten Buleleng. Independensi, pengalaman kerja, time budget pressure dan komitmen organisasi digunakan untuk melihat seberapa besar keempat hal tersebut mempengaruhi kinerja badan pengawas LPD di Kabupaten Buleleng.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka dapat disusun rumusan masalah berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja badan pengawas LPD?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja badan pengawas LPD?
3. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kinerja badan pengawas LPD?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja badan pengawas LPD?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kinerja badan pengawas LPD.
2. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja badan pengawas LPD.
3. Untuk menguji pengaruh time budget pressure terhadap kinerja badan pengawas LPD.
4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja badan pengawas LPD.



## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi, dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa kekuatan internal dan eksternal individu dapat mempengaruhi perilaku atau kinerja individu itu sendiri. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya konsistensi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja badan pengawas LPD.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Akademisi. Penelitian ini bermanfaat untuk seluruh kalangan akademisi, dari mahasiswa atau dosen dan upaya dalam memberikan informasi, pengetahuan serta menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja badan pengawas LPD.
- b. Untuk badan pengawas hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat tingkat independensi, memaksimalkan pengalaman kerja, meningkatkan pemahaman time budget pressure dan memperkuat komitmen organisasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai badan pengawas LPD.
- c. Untuk pembuat kebijakan LPD. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan badan pengawas dan tata kelola LPD.